

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA DEMOKRATIS

Funny W Mukti
funnywidiemukti9f@gmail.com

Universitas Suryakencana

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai kesadaran masyarakat dalam partisipasi politik serta dikhususkan bagi pemilih pemula yang merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang memiliki peran penting dalam menentukan dan menyelenggarakan setiap kegiatan kenegaraan, serta harus diingat bahwa Indonesia itu merupakan negara demokrasi yaitu pemerintahannya berdasarkan kedaulatan rakyat. Yaitu sesuai dengan konsep yang di kemukakan oleh Lincoln “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Jadi semakin banyak masyarakat terutama para kaum muda yang terlibat dalam partisipasi politik, maka proses demokrasi yang ada di negara akan berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik yang ada di negaranya. Meskipun pada dasarnya mempengaruhi dan menumbuhkan kesadaran seseorang mengenai partisipasi politik itu tidaklah mudah, tetapi hal ini tetap harus menjadi sebuah penyemangat untuk menuju sebuah harapan yaitu demokrasi yang baik, karena keikutsertaan masyarakat dalam mempengaruhi sebuah kebijakan pemerintah akan berdampak bagi kehidupan masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci : *Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Negara Demokratis*

PENDAHULUAN

Membicarakan mengenai demokrasi yang di mana demokrasi ini merupakan suatu bentuk sistem pemerintahan yang menempatkan setiap warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan sebuah keputusan. Hal ini tidak jauh dari pembahasan mengenai partisipasi, terutama dalam ranah politik. Karena demokrasi memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pembentukan, pembangunan, dan pembuatan aturan atau hukum baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui perwakilan. Terlihat juga dari ciri sebuah negara demokratis yaitu adanya keterlibatan dari masyarakat dalam suatu perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum, kemudian adanya pengakuan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat.

Kesadaran partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat bisa digunakan untuk mengukur demokratis atau tidaknya suatu proses pemilihan di sebuah negara. Karena

partisipasi itu bisa diartikan sebagai suatu tindakan yang muncul dari dirinya sendiri dalam proses pemilihan calon pemimpinnya. Partisipasi ini sangat menjaga kedaulatan pemilih, bahkan hak politik sepenuhnya diberikan dan dilindungi kepada masyarakat. Tentu hal ini berbeda pada saat pemerintah menggunakan pendekatan mobilisasi, yang di mana semuanya bersifat wajib dan terdapat pemaksaan dari atas (*top down*) untuk menghasut warga negara sebagai pemilih dalam sebuah proses pemilihan (Gatara & Said, 2011, hal. 191). Tentu saja hal ini sangat berkaitan erat dengan perampasan kedaulatan rakyat bebas berkehendak, baik dalam ranah politik maupun dalam bidang kehidupan lainnya.

Partisipasi ini mengandung arti bahwa rakyat atau masyarakat itu ikut serta dalam suatu proses pengambilan keputusan dalam bidang politik sekaligus pemerintahan. Hal ini dilakukan baik melalui perwakilan bisa juga secara langsung dengan penyampaian sebuah pendapat, baik dengan tulisan maupun secara lisan. Partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat merupakan hal terpenting dalam sebuah negara demokrasi yang di mana partisipasi ini menjadi suatu penentu dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan dalam bernegara serta sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu pemerintahan, ketika masyarakat memilih suatu hal yang positif maka akan menghasilkan hal baik, begitu pun sebaliknya.

Pemilih pemula adalah warga negara yang belum pernah mengikuti kegiatan pemilihan umum dan baru memiliki kartu tanda penduduk dan pertama kali menggunakan hak pilihnya. Para pemilih pemula ini kisaran usia 17 tahun dan termasuk kalangan remaja, kurangnya kesadaran dalam berpolitik pemilih pemula ini dikhawatirkan dapat menurunkan tingkat partisipasi politik, maka diperlukan suatu sosialisasi mengenai kehidupan berpolitik melalui pendidikan, mengingat pentingnya partisipasi politik dari pemilih pemula yang diyakini dapat menentukan berjalannya suatu sistem pemerintahan. Kesiapan dari pemilih pemula ini dapat ditentukan oleh kesadaran pemilih sendiri dalam menggunakan hak pilihnya secara maksimal dan bijak.

Dengan adanya kesadaran berpartisipasi khususnya dalam ranah politik maka akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan penyempurnaan suatu sistem demokrasi menuju yang lebih baik ke depannya. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi (Liando, 2016, hal. 22). Karena partisipasi masyarakat ini merupakan suatu bentuk keikutsertaan, kehadiran,

penyampaian pendapat, keterlibatan dalam pembuatan suatu kebijakan, memperhatikan ketika kebijakan itu akan diimplementasikan. Kesadaran tersebut tidak lepas dari suatu pendidikan, khususnya pendidikan politik yang memiliki peran yang sangat penting bagi pemilih pemula untuk memahami suatu kegiatan partisipasi terutama dalam bidang politik yang di dalamnya membahas mengenai penggunaan hak pilih secara bijak dalam proses pemilihan umum untuk memilih calon pemimpin mereka.

LANDASAN TEORI

Partisipasi politik

Partisipasi politik yang merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi (Hendrik, 2010, hal. 138). Partisipasi ini memiliki arti yang sangat penting dalam menjalankan sistem demokrasi. Karena ketika masyarakat memiliki tingkat partisipasi tinggi, maka pembangunan politik akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan bangsa dan negara untuk kedepannya. Rendah atau tingginya suatu partisipasi politik akan menjadi suatu tanda yang penting terhadap jalannya proses demokrasi serta perwujudan dari kedaulatan rakyat. Tingkat partisipasi ini dapat dipengaruhi oleh kehidupan pribadi, lingkungan keluarga, dan lingkungan pertemanan.

Semakin tinggi tingkat partisipasi politik yang di tunjukkan oleh masyarakat, hal ini menandakan bahwa masyarakat memahami, mengikuti, dan mau melibatkan dirinya dalam sebuah kegiatan kenegaraan. Sedangkan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat menandakan bahwa masyarakat kurang memahami, mendukung, dan menaruh minat terhadap suatu persoalan yang berhubungan dengan kekuatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik ini tercermin dari sikap suatu golongan pilih (golput) atau disebut juga kelompok apatis dalam pemilihan umum. Sebenarnya tingkat partisipasi politik dari masyarakat terutama dalam pemilihan umum adalah suatu hal yang penting untuk di teliti, karena tinggi dan rendahnya tingkat partisipasi ini merupakan suatu unsur penting yang berpengaruh terhadap jalannya suatu proses demokrasi dan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Partisipasi politik ini sebagai sarana dalam pemanfaatan hak dan kewajiban sebagai masyarakat di suatu negara.

Pemilih Pemula

Berbicara soal pemilihan umum maka didalam proses pelaksanaannya akan terdapat kelompok pemilih pemula yang merupakan seorang pemilih dengan kisaran usia 17-21 tahun dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya, biasanya terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya. Jika di perhatikan pemilih pemula ini adalah generasi muda yang memiliki keunikan dan perilaku yang berbeda-beda, jumlahnya pun terbilang lebih banyak dibandingkan dengan generasi sebelumnya, jika dilihat dari jumlah pertumbuhan di negara dari tahun ke tahun. Pemilih pemula ini adalah generasi yang belum memahami mengenai kehidupan perpolitikan, maka dibutuhkan suatu sosialisasi serta pendidikan yang sedikit banyak membahas tentang politik.

Pemilih muda juga sangat rentan di mobilisasi oleh kelompok kepentingan (Kharisma, 2015, hal. 2). Karena pemilih pemula ini lebih menyukai sesuatu hal yang sederhana dan mudah dimengerti, kebanyakan tidak tertarik terhadap suatu hal yang rumit dan sulit untuk di mengerti. Kelompok kepentingan ini adalah organisasi yang berusaha memperbaiki suatu kebijakan publik yang dapat menguntungkan anggota kelompoknya. Pemilih pemula ini memiliki kekuatan tersendiri dalam pemilihan umum, karena termasuk dalam kelompok yang memiliki semangat tinggi untuk memberikan suaranya pada setiap pemilihan umum. Yang harus menjadi perhatian adalah pendidikan politik karena masih terbilang rendah untuk pemilih pemula, hal ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran partisipasi politik.

Negara Demokratis

Membahas mengenai negara demokratis sebaiknya dipahami terlebih dahulu mengenai istilah demokrasi itu sendiri, yang pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari dua kata “demos” dan “kratos”. “demos” yang berarti rakyat atau penduduk setempat, dan “kratos” atau “Kratos” yang berarti pemerintah. Maka, demokrasi itu berarti pemerintahan rakyat banyak atau bisa juga diartikan rakyat yang berkuasa atau kekuasaan berada ditangan rakyat. Pemerintahan dikatakan demokrasi, apabila kekuasaan negara berada ditangan rakyat dan segala tindakan negara dapat ditentukan oleh kehendak rakyat. Kemudian demokrasi ini dijalankan untuk mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan menjalankan

pemerintahan untuk ke arah yang lebih baik. Meskipun dalam prosesnya terdapat suatu perubahan yang disebabkan oleh adanya kebebasan berpendapat yang dianggap bisa mengganggu kestabilan dalam masyarakat karena dianggap dapat mengancam fungsi-fungsi yang ada, dalam jarak waktu tertentu, setelah diadakan suatu adaptasi maka keseimbangan yang diharapkan akan muncul kembali.

Kemudian dalam negara demokrasi pasti terdapat suatu proses demokrasi yang ditandai dengan adanya pemilihan umum yaitu, pemilihan umum merupakan salah satu tonggak penting yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematis dan berkala (Hendrik, 2010, hal. 137). Jadi pemilihan umum ini dapat di jadikan sebagai unsur penting dalam sistem demokrasi. Jika proses pelaksanaan pemilihan umum ini dilakukan dengan cara adil, terbuka, seimbang, dan teratur maka dapat terwujud sebagai negara demokratis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik merupakan suatu keterlibatan masyarakat sebagai warga negara untuk mengambil bagian dalam suatu proses pemilihan serta sebagai suatu cara untuk mempengaruhi suatu proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum. Partisipasi ini biasanya berbentuk pemberian suara dalam pemilihan umum, ikut serta dalam keanggotaan baik secara aktif maupun pasif dalam suatu organisasi politik, ikut serta dalam sebuah diskusi yang membahas masalah politik, menghadiri sebuah pertemuan politik, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya yang dapat diikuti oleh masyarakat sebagai perwujudan dalam partisipasi politik. Seperti yang disampaikan oleh Miriam Budiarjo yang menyatakan bahwa Partisipasi Politik itu adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*publik policy*) (Budiardjo, 1994, hal. 183). Karena partisipasi politik ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sukarela yang muncul dari dalam dirinya pribadi sebagai warga negara yang memiliki keinginan untuk membangun negara demokratis.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai partisipasi politik yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa partisipasi politik adalah suatu kegiatan nyata yang dilakukan secara sukarela oleh warga negara atau masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Dari setiap kegiatan partisipasi ini masih ada beberapa golongan yang belum memahami akan partisipasi politik serta terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi politik aktif maupun partisipasi politik pasif. Anggota masyarakat atau kelompok ini hadir dengan didasarkan pada pemahaman mereka yang menganggap masyarakat yang terlibat dalam politik itu telah menyimpang dari apa yang mereka yakini dan cita-citakan. Golongan ini biasanya disebut sebagai kelompok apatis atau golongan putih (golput). Untuk mengurangi atau menghilangkan golongan ini bisa dengan cara meningkatkan kesadaran dalam berpartisipasi politik melalui suatu pendidikan, hal ini dilakukan untuk mewujudkan negara demokratis.

Dalam rangka mewujudkan negara yang demokratis untuk mencapai masyarakat yang sejahtera maka diperlukan suatu sosialisasi politik untuk menumbuhkan dan mengembangkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai partisipasi politik, jika suatu tindakan bersifat positif maka akan menghasilkan suatu hal yang positif juga yaitu mewujudkan negara demokratis terutama bagi pemilu pemula yaitu kalangan remaja atau pelajar yang termasuk pada golongan pemilih pemula serta memiliki peran penting dalam menentukan masa depan pemerintahan, bangsa, dan negara. Pemahaman ini harus disosialisasikan karena banyak tingkat partisipasi dari pemilih pemula dalam politik itu sangat rendah dibandingkan dengan generasi yang lebih tua (Kirana & Zainal, 2018, hal. 737). Padahal sebenarnya pemahaman mengenai partisipasi ini sangat penting diterapkan pada generasi muda yang merupakan pemilih pemula dan penentu berjalannya proses demokrasi di suatu negara untuk kedepannya.

Pemilih pemula itu adalah bagian dari masyarakat yang berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, memiliki kartu tanda penduduk, sudah menikah, atau sudah pernah kawin, tidak sedang dalam gangguan jiwa atau ingatan, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai suatu keputusan hukum tetap. Pemilih pemula ini merupakan generasi muda yang masih mudah untuk dipengaruhi, karena belum memiliki pemahaman mendalam mengenai partisipasi terutama dalam politik. Maka dari itu diperlukan suatu sosialisasi dan yang paling

menjadi sebuah perhatian adalah pendidikan politik yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran dalam partisipasi politik. Tingkat pendidikan politik di kalangan pemilih pemula masih terbilang rendah, yang di mana pendidikan politik ini membahas mengenai peningkatan kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara, serta meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun persatuan dan kesatuan negara.

Pemilih pemula yang kebanyakan terdiri dari kalangan pelajar ini merupakan kelompok yang memiliki keunikan tersendiri, keberadaan dari pemilih pemula ini sangat menjanjikan dalam setiap proses pemilihan umum. Siapa pun yang bisa merebut perhatian kalangan ini maka akan dapat merasakan keuntungannya, sebaliknya dukungan dari kalangan ini akan terasa merugikan bagi pemilihan yang akan dicapai (Wardhani, 2018, hal. 59). Hal ini akan menjadi suatu strategi untuk mengamankan posisi yang ingin dicapai dalam pemilihan umum. Suatu motivasi juga akan mendorong kesadaran partisipasi politik masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemilihan sebagai suatu bentuk sistem demokrasi. pemilih pemula mempunyai karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda (Wardhani, 2018, hal. 62). Tetapi dari berbagai perbedaan yang ada itu beberapa di antaranya memiliki kepedulian dan kesadaran akan hak politik mereka sebagai masyarakat.

Sosialisasi mengenai partisipasi politik ini diharapkan akan menumbuhkan serta meningkatkan kesadaran pada masyarakat terutama bagi pemilih pemula untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan politik salah satunya yaitu menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum sebagai suatu proses dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan umum. Serta untuk mengurangi jumlah golongan apatis atau golongan putih (golput), yang diakibatkan dari kurangnya sosialisasi atau pun pendidikan politik pada masyarakat terutama pemilih pemula akan mengakibatkan masyarakat tidak dewasa dalam mengikuti dan menyikapi suatu proses demokrasi. Pengetahuan politik akan membawa seseorang pada tingkat partisipasi tertentu (Nurdianyash, 2015, hal. 55). Dengan pengetahuan politik yang luas akan membuat seseorang berperan aktif dan ikut serta dalam bidang politik begitu pula sebaliknya. Karena partisipasi politik didasarkan pada kesadaran setiap individu dalam menentukan pilihan. Maka keinginan dalam mewujudkan negara demokratis akan tercapai dan sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahan akan

berjalan dengan baik. Dengan adanya kesadaran dalam partisipasi politik dari masyarakat maka akan menciptakan proses demokrasi yang baik serta akan terwujud negara demokratis yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini dapat terwujud ketika masyarakat menggunakan sarana pendidikan politik secara baik untuk menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik dapat meningkatkan kesadaran seseorang atau masyarakat dalam melihat kehidupan politik, kemudian partisipasi politik merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mempengaruhi suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, pemilih pemula di berikan sebuah pemahaman mengenai partisipasi politik melalui proses pembelajaran. Karena pemilih pemula memerlukan suatu kesiapan dalam menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pilihannya, hal ini bisa di lakukan dengan pemberian pemahaman mengenai partisipasi politik melalui suatu pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran dalam partisipasi politik. Kemudian tidak sedikit pemilih pemula yang tidak menggunakan hak pilihnya, hal ini bisa terjadi ketika tingkat pendidikan terutama mengenai politik cukup rendah dan pada umumnya mereka adalah pemilih yang belum mempunyai kesadaran politik serta terdapat perasaan tidak percaya pada dirinya berhubungan dengan pemerintahan. Bentuk partisipasi politik dalam pemilihan umum dari pemilih pemula itu berupa keikutsertaan dalam kampanye, pemberian suara atau menggunakan hak pilihnya, dan berbicara masalah politik.

Setiap sikap dan perilaku yang terbentuk dari masyarakat itu sangat diperlukan terutama tindakan dari pemilih pemula, karena setiap warga negara harus ikut membangun negaranya, bahkan wajib diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk membangun dan mengembangkan diri sendiri dan lingkungannya agar bisa mewujudkan harapannya yaitu mencapai kesejahteraan dan mewujudkan negara demokratis. karena

semua usaha yang dilakukan dalam membangun suatu negara itu hanya akan terlaksana jika mendapatkan partisipasi dari masyarakat terutama pemilih pemula sebagai generasi muda dan harapan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwiyah, M. Y. (2012). Status sosial ekonomu dan kualitas partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik. *MIMBAR*, 85-92. <http://www.neliti.com/publications/7436>
- Budiardjo, M. (1994). Demokrasi di Indonesia demokrasi parlementer dan demokrasi pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 330 hlm. <https://opic.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=568821>
- Gatara, A. S., & Said, M. D. (2011). *Sosiologi Politik*. Bandung: Pustaka Setia. http://katalog.pustaka.unand.ac.id/index.php?p=show_detail&id=107724
- Halim, U., & Jauhari, K. D. (2019). Pengaruh terpaan media terhadap partisipasi politik dalam pilkada DKI Jakarta 2017. *Jurnal ASPIKOM*, 45-59. DOI: <http://dx.doi.org/10.24329/aspikom.v4i1.385>
- Hendrik, D. (2010). Variabel-variabel yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pilkada walikota dan wakil walikota padang tahun 2008. *DEMOKRASI*, 137-148. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd.article/view/1421>
- Juditha, C., & Darmawan, J. J. (2018). Penggunaan media digital dan partisipasi politik generasi milenial. *Jurnal penelitian komunikasi dan opini publik*, 91-105. DOI: 10.33299/jpkop.22.2.1628
- Kharisma, D. (2015). Peran pendidikan politik terhadap partisipasi politik pemilih muda. *ACADEMIA*. <https://www.neliti.com/id/publications/1144/peran-pendidikan-politik-terhadap-partisipasi-politik-pemilih-muda>
- Kirana, L. L., & Zainal, M. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam bingkai jejaring sosial di media sosial. *Jurnal ASPIKOM*, 737-754. DOI: <http://dx.doi.org/10.24329/aspikom.v3i4.210>
- Kusmanto, H. (2013). Peran badan permusyawaratan daerah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. *Jurnal ilmu pemerintahan dan sosial politik*, 39-47. DOI: <https://doi.org/10.31289/jppuma.v1i1.550>
- Lestari, E. Y., & Arumsari, N. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan walikota Semarang di kota Semarang. *INTEGRALISTIK*, 63-72. DOI: <https://doi.org/10.15294/integralistik.v29i1.14602>
- Liando, D. M. (2016). Pemilu dan partisipasi politik masyarakat (studi pada pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan calon wakil presiden di kabupaten Minahasa tahun 2014. *Jurnal LPPM bidang EkoSosBudKum*, 14-28.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/17190>

- Millah, N. S., & Dewi, D. A. (2021). SKPP BAWASLU sebagai sarana pendidikan politik dalam upaya meningkatkan partisipasi politik warga negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 355-363. DOI: <http://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1583>
- Nurdianyash, E. (2015). Implementasi pendidikan politik bagi warga negara dalam rangka mewujudkan demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 54-58. DOI: <https://doi.org/10.36706/jbti.v2i1.4560>
- Parawansa, K. I. (t.thn.). Hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia. *ACADEMIA*, 41-52.
https://www.academia.edu/11601341/Hambatan_terhadap_Partisipasi_Politik
- Suharyanto, A. (2014). Partisipasi politik masyarakat Tionghoa dalam pemilihan kepala daerah. *Jurnal ilmu pemerintahan dan sosial politik*, 151-160.
DOI: <https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i2.920>
- Suharyanto, A. (2016). Surat kabar sebagai salah satu media penyampaian informasi politik pada partisipasi masyarakat. *Jurnal adminitrasi publik*, 123-136. DOI: <https://doi.org/10.31289/jap.v6i2.1051>
- Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *Jurnal pendidikan ilmu-ilmu sosial*, 57-62.
DOI: <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Yustiningrum, R. E., & Ichwanuddin, W. (2015). Partisipasi politik dan perilaku memilih pada pemilu 2014. *Jurnal penelitian politik*, 117-135.
DOI: <https://doi.org/10.14203/jpp/v12i1.533>